

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU SIPOGAS DI
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

FAJAR DWIPA RIZKI

137310003

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fajar Dwipa Rizki
NPM : 157310003
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Hari, Tgl Seminar : Kamis, 26 April 2018
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 19 November 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Pembimbing II



Yendri Nazir, S.sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua Jurusan



Budi Mulianto, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSetujuan Tim Penguji

Nama	: Fajar Dwipa Rizki
NPM	: 137310003
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 02 April 2019

Ketua

[Signature]
Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Sekretaris

[Signature]
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si
 Anggota

Drs. H. Zaini Ali, M.Si
 Anggota

[Signature]
Prof.Dr.H.Yusri Munaf,SH.,M.Hum
 Anggota

[Signature]
Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bagian Akademik

[Signature]
Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 502/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2019 jam 10.00 -- 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fajar Dwipa Rizki
 NPM : 137310003
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap Pembangunan Objek Wisata Danau Sipapas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Nilai Ujian : Angka " 75.62 " ; Huruf " B+ "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihalin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. H. Yesri Munaf, SH., M.Hum.	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Anggota	6. 

Pekanbaru, 28 Maret 2019

 Dr. H. Panca Setyo Prihalin, S.IP., M.Si.
 Ketua Tim Penguji

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 302/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor: 046/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Fajar Dwipa Rizki
N P M	: 137310003
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pembangunan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

1. Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi,S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs.H. Zaini Aha,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Prof.Dr.H.Yusti Munir,SH,M.Hum	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Agung Wicaksono.,MPA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Maret 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsipsk.penguji.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	Isa Dwipa Rizki
NPM	: 137310003
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademik, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 24 Maret 2019
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.S.IP.,M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Wakil Dekan I

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Mulianto, S. IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini yang berjudul “Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”. Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,MCL, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia.,S.Sos.M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando., S.IP,M.Si selaku Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof.Dr. H. Yusri Munaf,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing I (Satu) atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yendri Nazir,S.sos., M.Si selaku dosen pembimbing II (Dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada Ayahanda terkasih Wisma Priyanto dan Ibunda tersayang Fahmi serta seluruh keluarga besar tercinta, atas segala kerja

keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti bagi penulis.

Akhir kata hanya ucapan terimakasihlah yang bisa penulis berikan kepada semua orang-orang yang tersayang. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahaufikwalhidayah, wassalamu'alaikumWr.Wb.

Pekanbaru, 02 Januari 2019
Penulis,

Fajar Dwipa Rizki



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	 18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Teori Ilmu Pemerintahan.....	18

2. Teori Pemerintahan.....	20
3. Konsep Pemerintahan Daerah	22
4. Teori Organisasi	23
5. Teori Pengembangan Organisasi.....	24
6. Teori Manajemen dan Manajemen Pemerintahan.....	25
7.. Pengertian Peranan.....	28
8.. Teori Tugas dan Fungsi.	29
9.. Kepariwisataaan.	30
10. Pengembangan Pariwisata.....	40
B. Kerangka Pikir	46
C. Konsep Operasional	47
D. Operasional Variabel.....	49
E. Teknik Pengukuran	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	57

BAB IV	TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	59
	A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	59
	1. Keadaan Geografis.....	59
	2. Keadaan Penduduk	60
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
	A. Identitas Responden.....	61
	1. Jenis Kelamin Responden.....	61
	2. Pekerjaan Responden.....	62
	3. Tingkat Pendidikan Responden.....	62
	B. Hasil dan Pembahasan Data Indikator Variabel Analisis Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	63
	C. Hambatan-Hambatan dan Kendala Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas.....	74
BAB VI	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Wisata Kawasan Miniatur Hutan Tropis Rokan Hulu.....	13
I.2 : Data Sarana dan Prasarana Objek Wisata Danau Sipogas.....	14
II.1 : Operasional Variabel.....	49
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian.....	55
V. 1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	62
V.3 : Identitas Reponden Penelitian Berdasarkan Pendidikan.....	63
V.4 : Tanggapan Responden Terhadap Indikator Perencanaan.....	64
V.5 : Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengorganisasian.....	67
V.6 : Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pelaksanaan.....	69
V.7 : Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengawasan.....	71
V.8 : Rekapitulasi Jawaban Responden.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.I : Denah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	5
II.1 : Kerangka Pikir Tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu
2. Daftar telly kuisioner responden
3. Daftar kuisioner penelitian tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu
4. Daftar wawancara penelitian tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu
5. Dokumentasi penelitian tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
6. SK Dekan Fisipol UIR No 334/UIR-Fs/Kpts/2017 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
7. Surat Rekomendasi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/13292 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
8. Surat Rekomendasi Penelitian Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/020 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Fajri Dwipa Rizki
NPM	: 137310003
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya Menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2019

Pelaku Pernyataan

METERAI
TEMPEL
E4503AFF177383771
6000
Fajri Dwipa Rizki

ABSTRAK

PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU SIPOGAS DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

Fajar Dwipa Rizki
137310003

Kata Kunci : Peranan, Pengembangan, Objek Wisata

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Tipe penelitian yang diambil adalah deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung kepada subjek penelitian, dokumentasi dengan cara mengambil data-data yang diambil berupa catatan atau dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut tentang subjek yang diteliti, wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini dan kuesioner dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden serta ditunjang dengan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian yang tentunya berhubungan langsung dengan topik penelitian ini. Adapun subjek penelitian adalah Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tanggapan responden secara keseluruhan ialah berada pada kategori “cukup baik”. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya Peranan Dinas berupa kegiatan-kegiatan promosi. Konsep teori yang di gunakan menurut George terry dengan indicator yang ditetapkan di ambil dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.

Adapun yang mempengaruhi faktor penghambat peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas adalah kurangnya daya tarik terhadap wisatawan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF TOURISM AND CULTURE ON THE DEVELOPMENT OF THE SIPOGAS LAKE IN DISTRICT OF RAMBAH, ROKAN HULU REGENCY

By:

Fajar Dwipa Rizki

137310003

Keywords: Role, Development, Tourism Objects

This study aims to determine the role of tourism and cultural services towards the development of Sipogas Lake tourism objects in the sub-district of Rambah along with the Rokan Hulu Regency.

The type of research was descriptive by using quantitative and qualitative methods with data collection techniques carried out by observation techniques. And the research conducted by direct observation to the subject of research, documentation by taking the data taken in the form of notes or documentation by analyzing these documents about the subject under study, in-depth interviews using interview guidelines where the researcher held a direct question and answer with several informants related to the discussion of this research and questionnaire by giving a number of written questions to the respondent and supported by primary and secondary data obtained during the study which is directly related to the topic of this research. The research subject was the Government of the Rokan Hulu District Tourism and Culture Office.

Results of the study indicate that the role of the tourism and cultural services towards the development of Sipogas lake tourism objects in the sub-district encompasses the sub-district of Rambah along with the Rokan Hulu Regency. According to the responses of the respondents as a whole in the category of "good enough". This can be seen from the lack of the role of the agency in the form of promotional activities. The theoretical concept that used according to George Terry with the specified indicators was taken from planning, organizing, implementing, monitoring.

Finally, attraction to tourists became the factors that influence the role of tourism and cultural services towards the development of the Sipogas lake.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah kabupaten dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa Negara telah dibagi menjadi Daerah provinsi dan Daerah provinsi dibagi lagi dalam Daerah yang lebih kecil, yaitu kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan Daerah-Daerah tersebut kesemuanya diatur menurut undang-undang.

Berdasarkan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. penyelenggaraan pemerinthan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu Daerah dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan

dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Maka menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan:

1. Pemerintah pusat adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Selanjutnya pembagian urusan pemerintahan diatur dalam pasal 9 yang berbunyi:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan UU N0. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Otonomi yang

bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam bentuk wujud dan tugas serta kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

Pada pasal 11 undang-undang nomor 23 tahun 2014 urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan, meliputi :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Pariwisata
6. Industry
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan di Indonesia pada saat ini secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang cukup luas pada tata kehidupan masyarakat, baik secara nasional maupun local. salah satu urusan pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemerintah. Urusan pemerintah ada 3 yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah
2. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
3. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam menjalankan kewenangan dalam sector pariwisata, salah satu Daerah Otonom yang diberikan kewenangan yaitu Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, dahulu Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatra Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai teratak air hitam yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah Kampar sekarang, hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau, terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari Wilayah Provinsi Sumatra Barat. Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 779485 km, terdiri dari 16 Kecamatan dan 16 Kelurahan/127 Desa, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 475.011 jiwa. Kabupaten Rokan Hulu dijumpai Negeri Seribu Suluk, ibu kotanya Pasir Pengaraian.

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat di lihat berdasarkan Denah di bawah ini:



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang kepariwisataan pasal 3 kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didalamnya terdapat susunan organisasi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Perumusan sasaran urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pengkoordinasian penyusunan tujuan dan program urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Merumuskan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. Mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- h. Membina urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- i. Mengarahkan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati selaku Kepala Daerah.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan-urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, melaksanakan penyusunan data, informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian,
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan,
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Kepala Bidang Pariwisata

(1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang pariwisata dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi promosi pariwisata
- b. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengembangan pariwisata
- c. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;

- d. Merencanakan kegiatan Pariwisata berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Bidang Pariwisata dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- g. Membimbing para bawahan dilingkungan Bidang Pariwisata melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan dilingkungan Bidang Pariwisata guna penyempurnaan lebih lanjut;
- i. Menilai kinerja para bawahan dilingkungan Bidang Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- j. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
- k. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimilasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Bidang Pariwisata;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- m. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata;

4. Seksi Promosi

(1) Seksi promosi dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, evaluasi, dan koordinasi promosi pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Promosi mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan promosi pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi promosi pariwisata;
- c. Merencanakan kegiatan Seksi Promosi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi promosi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- e. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Promosi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- f. Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Promosi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Promosi guna penyempurnaan lebih lanjut;
- h. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Promosi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;
- i. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Promosi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- j. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Promosi;
- k. Menyiapkan bahan penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- l. Menyiapkan bahan peserta/penyelenggaraan pameran/event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah/provinsi;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- n. Menyiapkan bahan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata;
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- p. Melakukan koordinasi antar Seksi Promosi;
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata; dan
- r. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Promosi.

5. Seksi Pengembangan

(1) Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pengembangan pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Pengembangan mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan pengembangan pariwisata
- b. Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pengembangan pariwisata;
- c. Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- e. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pengembangan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- f. Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- h. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;
- i. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- j. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan;
- k. Menyiapkan bahan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional;
- l. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata;

- m. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- n. Melakukan koordinasi antar Seksi Pengembangan;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata; dan
- p. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan.

6. Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan perencanaan sarana dan prasarana pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi sarana dan prasarana pariwisata;
- c. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesinsi pelaksanaan tugas;
- e. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- f. Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana guna penyempurnaan lebih lanjut;
- h. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;

- i. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dan landasan kerja;
- j. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana;
- k. Menyiapkan bahan pengadaan sarana pemasaran;
- l. Menyiapkan bahan pembentukan perwakilan kantor promosi Pariwisata di dalam negeri;
- m. Menyiapkan bahan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- o. Melakukan koordinasi antar Seksi Sarana dan Prasarana;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata; dan
- q. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana.

Potensi yang dimiliki oleh sector pariwisata dapat di kembangkan sebagai aktifitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa yang cukup besar. Selain itu hal ini dapat memberikan lahan usaha yang besar dan dapat mendatangkan keuntungan yang banyak,tidak saja bagi pemerintah daerah melalui peningkatan pajak-pajak dan retribusi tetapi juga bagi masyarakat sebagai pelaksanaan jasa yang menyangkut pengadaan fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang di sector pariwisata.

Potensi Wisata Kabupaten Rokan Hulu

I. Data Wisata Kawasan Miniatur Hutan Tropis Indonesia Kabupaten Rokan Hulu

NO	JENIS OBJEK WISATA	DESA / KEL	KEC	LUAS	JARAK DARI IBU KOTA	TITIK KOORDINAT	KET
1	AIR PANAS HAPANAS AN	Rambah Tengah Hulu (Pawan)	Rambah	9 Ha	8 KM	N 00° 49' 49.7" E 100° 16' 13.9"	
2	DANAU SIPOGAS	Sialang Jaya	Rambah	4 Ha	10 KM	N 00° 49' 20.0" E 100° 16' 51.3"	
3	AIR PANAS SUAMAN	Rambah Tengah Hulu (Pawan)	Rambah	0,25 Ha	9 KM	N 00° 49' 33.0" E 100° 15' 24.6"	
4	AIR TERJUN AEK MARTUA	Tangun	Bangun Purba	10 Ha	24 KM	N 00° 51' 04.2" E 100° 09' 28.5"	
5	GUA RIMBA HUTA SIKAFIR	Rambah Tengah Hulu (Pawan)	Rambah	6 Ha	10 KM	N 00° 49' 19.0" E 100° 15' 06.2"	
6	DANAU MENAMIN G	Menaming	Rambah	20 Ha	14 KM	N 00° 51' 54.4" E 100° 12' 40.8"	
7	AIR TERJUN PARLAKKI TANGAN	Rambah Tengah Hulu (Pawan)	Rambah	1,5 Ha	12 KM	N 00° 49' 46.6" E 100° 13' 21.5"	
8	BATU GAJAH	Rambah Tengah Hulu (Pawan)	Rambah	2 Ha	12 KM	N 00° 49' 33.9" E 100° 13' 53.6"	
9	SUNGAI BUNGO	Sialang Jaya	Rambah	1 Ha	15 KM	N 00° 47' 18.0" E 100° 16' 06.7"	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa danau cibogas terletak di kelurahan Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, dengan luas 4 Ha, dengan jarak 8km dari ibukota pasir pengaraian.

Menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu fungsi penting pemerintahan yang juga harus dilaksanakan untuk menjamin tercapainya pemerintahan yang baik. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman atau ketentuan yang akan dipatuhi masyarakat dalam berbagai aktivitasnya, maupun bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel I.I Data Sarana dan Prasarana Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015

NO	Nama Objek dan Kegiatan	Jumlah	Satuan	Keadaan						
				Baik	Rusak	Jumlah Baik	Jumlah Rusak	Tahun di Peroleh	Asal Barang	Ket.
I. Objek Wisata Danau Cibogas										
	Musholla	1	Unit					2003	APBD	
	Kamar Kecil (Wc)	1	Unit					2003	APBD	
	Payung Tempat Duduk Pengunjung	3	Unit					2004	APBD	
	Mesin Boat (Yamaha)	1	Unit					2004	APBD	
	Tanah Sipogas	17.945	M2					2004	APBD	
	Mesin Boat	1	Unit					2004	APBD	
	Sampan Dayung Fiber (Bebek)	3	Unit					2005	APBD	
	Gapura	1	Unit					2005	APBD	
	Gazebo	9	Unit					2006	APBD	
	Arena Panjat Tebing	1	Unit					2007	APBD	
	Rumah Jaga	1	Unit					2007	APBD	

Mesin Rumpot	2	Unit						2009	APBD	
Dermaga	1	Unit						2009	APBD	
Boat (Bebek Dayung)	6	Unit						2012	APBD	
Mesin Potong Rumpot	2	Unit						2012	APBD	
Pembangunan MCK	1	Unit						2012	APBD	
Mic Sandang	1	Unit						2012	APBD	
Mini Chainsaw	1	Unit						2013	APBD	
Mesin Air	1	Unit						2013	APBD	
Tower + Tangki Air	1	Unit						2013	APBD	
Mesin Genset	1	Unit						2013	APBD	
Mesin Boat	2	Unit						2013	APBD	
Pot Bunga		Unit							APBD	
Jalan Setapak Semen	150	M2							APBD	
Mesin Potong Rumpot	2	Unit						2015	APBD	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Fenomena yang terjadi adalah:

1. Kurangnya pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Kurang nya peran dan fungsi masyarakat terhadap pengembangan dan atraksi pariwisata.
3. Kurang nya kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan adat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang dijelaskan dari fenomena dan gejala di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok pada penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa masalah yang telah di kemukakan di atas, terdapat beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas di Kecamatan Rambah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan dapat juga menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang

- b. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan
- c. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan mengkaji Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak) jadi empirik. Berdasarkan definisi itu dapat di kontruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie 2005:21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Musanef (dalam Syafiie 2007:32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu pemerintahan yang menjadikan unsur-unsur Dinas sebagai pemimpin dan penguasa suatu kepentingan yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan suatu keluhan atau pendapat.
2. Suatu Ilmu yang mempelajari sistematis dengan masalah sentralisasi, desentralisasi, koordinasi dalam pengawasan luar dan dalam, serta dapat mencari Dinas-Dinas yang terbaik untuk menjalankan suatu sistem Pemerintahan

3. Ilmu Pemerintahan yang mengatur Tentang hubungan baik pemerintah dengan masyarakat yang di atur untuk mengurangi pertentangan-pertentangan terhadap pihak lain agar dapat keserasian pendapat tindakan yang bersifat efektif dan efisien dalam suatu pemerintahan.
4. Ilmu yang di terapkan untuk mengadakan penyelidikan Dinas umum dalam arti luas baik terhadap susunan maupun alat organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga dapat di peroleh metode pekerjaan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan suatu Negara.

Menurut Ndraha (Sadu 2013) ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memenuhi serta melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan Taliziduhu Ndraha (Syafiie 2011:3) mendefenisikan ilmu pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan setiap orang untuk jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Sementara itu eksistensinya sistem pemerintahan, politik dan administrasi Negara Indonesia akan berkembang sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah serta perubahan dan faktor lingkungan (Syafiie 2007:4).

Ndraha (2003:7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan terdiri dari

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan,kewajiban,dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintah
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan,menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya
7. Bagaimana membentuk pemerintahan yang sedemikian itu
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan,menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawab
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Menurut Munaf (47:2016) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan / Negara.

2. Teori Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya dan sebagainya. pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif proses demand-supply, produksi konsumsi, pemasaran, penjualan distribusi ekspedisi, pembelian, penerimaan, penggunaan dan evaluasi feedback.

Pemerintahan adalah proses produksi dan distribusi alat-alat pemenuh kebutuhan dan tuntutan rakyat,Ndraha (2003:146)

Secara umum pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Dari sistem politik tertutup ke sistem politik terbuka
2. Dari sistem pemerintahan birokratis-partisan ke sistem pemerintahan demokratik dengan pilihan
3. Dari sistem pemerintahan hyper sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik
4. Dari pertanggung jawaban vertical ke pertanggung jawaban horizontal (pertanggung jawaban pasar)
5. Dari paternalisme despotic ke control sosial
6. Dari suksesi (penggantian jabatan) berdasarkan dinasti atau anugerah ke recruitment dan selection
7. Dari lompatan ke tahap teknologi
8. Dari manajemen proyek ke manajemen fungsi dan tugas
9. Dari budaya epimetheanistik ke budaya prometheanistik
10. Dari kita menjadi saya
11. Unit kerja pemerintahan yang paling bawah diperlukan sebagai embel-embel, pelengkap penderita, diabaikan
12. Dari pemberian ke pemberdayaan
13. Dari sesuai dengan aturan yang berlaku ke sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan aspirasi rakyat kalimat sesuai dengan aturan yang berlaku adalah bahasa birokrasi
14. Dari menolong ke dialog (Ndraha 2003:149)

Sedangkan menurut Ndraha (dalam Wasistiono dan Rahyunir, 2003:6) menyatakan pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang di perintah.

Pemerintahan ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok agar dapat menjalankan pelayanan untuk dapat membuahkan keadilan, dan kemandirian serta dapat menciptakan pembangunan dan kemakmuran untuk masyarakat, Rasyid (Hamdi 2006:72)

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat-istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, Pemerintah ialah organ yang mengurus layanan public untuk warga Negara asing yang berada pada wilayah Indonesia yang sudah terdata secara sah dan memiliki hak untuk bertempat tinggal di Negara Indonesia.

3. Konsep Pemerintah Daerah

Sebagai sebuah Negara Republik Indonesia memiliki filsafat Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 kerangka kenegaraan dan sistem Pemerintahan Republik Indonesia diatur. Negara Indonesia adalah Negara konstitusi yang menggunakan sistem demokrasi dan berbentuk Negara kesatuan. Untuk menyelenggarakan Negara Indonesia, dibentuk lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu :

1. Legislative
2. Eksekutif
3. Yudikatif
4. Pemeriksa Keuangan

Namun, melihat wilayah Negara Indonesia sangat besar dengan letak geografi yang luas dengan kondisi sosial budaya yang beragam. UUD 1945 kemudian mengatur perlunya Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan Undang-

Undang yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan, (Nurcolis:2005).

Pengembangan perwilayahan adalah suatu sistem pembangunan yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan kondisi atau potensi dan masalah serta spesifikasi setempat, dimana seluruh potensi secara utuh dan terpadu tetap memandang dan mengingat kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

4. Teori Organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah kerangka didalam dimana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengetahuan adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruh nya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Kelangsungan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai suatu usaha sebagaimana yang tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi adalah sumber daya manusia agar dapat mendukung sebuah kelangsungan organisasi.

Organisasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat kerja sama agar mencapai tujuan tertentu yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan organisasi dapat terbentuk perserikatan manusia, agar tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

Inu Kencana Syafiie (2008:30) organisasi merupakan :

- a. Adanya wilayah atau tempat yang akan dilaksanakannya administrasi
- b. Dapat mempererat hubungan antara individual dengan kelompok baik dari dalam maupun dari luar sebuah organisasi
- c. Adanya proses pengenalan diri terhadap orang lain melalui organisasi
- d. Berlangsungnya aktivitas yang melibatkan kemampuan masing-masing individu maupun kelompok.

Teori organisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari kerja sama pada individu atau kelompok yang berfungsi menjalankan kegiatan dan dinamika memberikan tuntutan dalam pengambilan keputusan berdasarkan prediksi dalam lingkungan kerja organisasi.

Sedangkan pendapat yang di kemukakan oleh Chester I Barnard (syafiie 2011;11) organisasi merupakan sistem yang mengatur aktivitas manusia menurut kemampuan yang dimiliki agar menghasilkan suatu wujud dan tidak melihat dari sudut manapun baik usia atau penampilan.

5. Teori Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi diperlukan karena organisasi harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan organisasi di berbagai aspek kehidupan yang ada di lingkungan sekitar seperti teknologi, politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

Pengembangan organisasi merupakan suatu organisasi yang relative baru dengan cepatnya berubah sebagai akibat pengetahuan baru dapat digunakan untuk semua anggota yang bergabung di dalam organisasi agar bisa mengembangkan pengetahuan yang baru untuk kedepan nya, moekijat (2005:1). Dengan demikian ada beberapa ketidaksesuaian diantara penulis dan praktisi tentang hakikat dan

luasnya pengembangan di dalam organisasi. Dalam kenyataan tidak ada satu definisi pun yang dapat disetujui oleh semua pihak.

Menurut Siagian (2007:4) beberapa pengertian tentang pengembangan organisasi yaitu :

- a. Pengembangan organisasi merupakan proses pengumpulan perencanaan yang sistematis agar dapat dilakukan secara terus-menerus di dalam pengembangan organisasi.
- b. Pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan memiliki sifat situasional atau kontingensi untuk meningkatkan efektifitas suatu organisasi
- c. Pengembangan organisasi lebih menggunakan sistem untuk mengatur sarana dalam mengembangkan organisasi agar bisa di kenal oleh masyarakat yang ingin mengikuti organisasi tersebut tanpa ada keraguan.
- d. Perencanaan yang sengaja dilakukan untuk perubahan agar dapat mengembangkan organisasi melalui pola pikir masyarakat.

Menurut Yoeti (1996:15) pengembangan berasal dari kata kembang yang artinya bertambah, sempurna, atau membiak, menjadi banyak, merata, meluas dan sebagainya. Berkaitan dengan kegiatan pariwisata, pengertian pengembangan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk :

- a. Memelihara, menata dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pengembangan Objek Wisata
- b. Meningkatkan pengembangan fisik sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata
- c. Meningkatkan peran masyarakat sekitar objek wisata maupun pihak swasta dalam menumbuhkan industry pariwisata
- d. Melakukan berbagai langkah nyata untuk meningkatkan daya tarik objek wisata dan menarik wisatawan mengunjungi objek wisata secara langsung maupun tidak langsung.

6. Teori Manajemen dan Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut Sulistiyani dan Risida,2009 (dalam Danang 2012:2);George R.Terry (dalam Danang 2012:2) manajemen adalah kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi yang dapat di tentukan terlebih dahulu dengan bantuan dari orang lain, agar dapat menjalankan organisasi secara teratur.

John M. Pfifner (dalam Danang 2012:2) manajemen mengharuskan seseorang melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk yang telah di berikan agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Stoner dan Freeman (dalam Danang 2012:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Hasibuan (2006:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Supriyatno (2009:27) manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya manajemen pemerintahan muncul dari berbagai fungsi pemerintahan dalam rangka melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan rakyat nya sesuai fungsi Negara. Fungsi Negara menurut Borre dan Goldsmith dalam Supriyatno (2009:45-46) adalah:

1. Berkaitan dengan pertahanan, yakni melindungi dan mengembangkan wilayah Negara
2. Berkaitan dengan keamanan internal, yakni penegakkan hukum.
3. Peningkatan kesejahteraan penduduk, pemeliharaan legitimasi ideology dan simbolik.

Sedangkan fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyatno

(2009:46) dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan Negara pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi Negara
6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Manajemen pemerintahan mengharuskan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan.
9. Manajemen pemerintahan berarti menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerintahan.
10. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Manajemen pemerintahan berarti menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang akan menempati jabatan di bidang pemerintahan.
13. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan bimbingan dan mengontrol atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi bidang tata kelola pemerintahan.
14. Manajemen pemerintahan merupakan pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang di sahkan atas nama Negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Manajemen pemerintahan berarti pelayanan standar pemberian izin untuk investor yang akan menanamkan modal nya.
16. Manajemen pemerintahan berarti pengaturan sistem kelembagaan perekonomian Negara.
17. Manajemen pemerintahan berarti penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang administrasi atau perbatasan daerah.

18. Manajemen pemerintahan memiliki arti untuk menetapkan arahan agar dapat melaksanakan pengawasan yang berada pada bidang tata kelola pemerintahan.
19. Manajemen pemerintahan berarti penyelenggaraan hubungan kerja di bidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

7. Pengertian Peranan

Dalam pengetahuan umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berintraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan sesuatu kegiatan mengenai tugas dan kewajiban. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak jelas. Menurut Sedarmayanti (2004: 33) tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebuah lembaga yang telah ditetapkan untuk melakukan administrasi di setiap tingkatan pemerintah baik di daerah kabupaten/kota ataupun daerah provinsi.

Peranan menurut Soekanto (2007:212) peranan (role) dapat juga disebut sebagai aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang sudah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia memiliki kewajiban menjalankan suatu peranan.

Menurut Soekanto (2007:213) mencakup sedikit tiga pengertian:

- a. Peranan mengandung norma-norma yang terletak di dalam masyarakat untuk menyatukan posisi di dalam peranan seseorang
- b. Peranan adalah konsep yang telah di jalankan seseorang untuk mengurus suatu organisasi di lingkungan sekitar.
- c. Peranan juga dapat dikatakan seorang yang memiliki tugas penting untuk menjalankan organisasi atau membuat struktur sosial di masyarakat.

Menurut Kansil dan Cristine (2003:190) kebijakan merupakan aturan-aturan yang dijadikan acuan, landasan bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Dari pengertian peranan dari Soekanto,yang mana menjelaskan bahwa didalam peranan terdapat kedudukan,peranan ada apabila ada kedudukan,begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan. Jadi peranan merupakan aspek fungsional dari kedudukannya,berarti orang tersebut menjalankan peranan nya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya.

8. Teori Tugas dan Fungsi

Thoha (2011:76) tugas pokok adalah suatu pencapaian yang harus di lakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki kemampuan kerja berdasarkan tujuan,visi, dan misi suatu organisasi tersebut.

Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tanggung jawab, perintah yang sudah di berikan untuk mencapai sebuah tujuan.

Menurut Moenir (2010:18) tugas di gunakan untuk memajukan suatu bagian atau unsur dalam suatu tugas, jabatan, atau pekerjaan khusus yang telah di berikan guna mencapai suatu tujuan.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian sebuah tugas yang berhubungan satu sama lain untuk di lakukan oleh seorang pegawai berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan pekerjaannya.

Menurut Winardi (2003:26) tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan suatu pekerjaan atau aktivitas yang harus di lakukan oleh pegawai yang saling berkaitan menurut tugas pelaksanaannya guna mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut.

9. Kepariwisataan

Untuk dapat lebih mudah dalam memahami status kepariwisataan dalam pengembangannya sesuai dengan perubahan zaman yang selalu terjadi, maka dalam kepariwisataan perlu terlebih dahulu dipahami tentang pengertian dari kepariwisataan itu sendiri, pengertian Kepariwisataan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ialah : “Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,

rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

James Spillane (2001:3) juga mengatakan bahwa pariwisata adalah seluruh fenomena dari hubungan yang muncul antara wisatawan, pengusaha, pemerintah dan masyarakat daerah tujuan wisata, dalam rangka menarik para wisatawan atau pengunjung lain ditempat wisata.

Mcintosh dan gupta sebagaimana diterjemahkan oleh pandit (2004:30) mengemukakan bahwa: “Pariwisata adalah gabungan dan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan rumah dan masyarakat tuan rumah dalam menarik dan melayani wisatawan ini serta pengunjung lainnya”.

Dari beberapa penelitian pariwisata diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggalnya ke daerah lain untuk menikmati objek daya tarik yang dilakukan secara sukarela dan dalamjangkauan waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan **turis** atau **wisatawan** adalah setiap orang yang memenuhi 2 kondisi, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang tersebut sedang tidak berada ditempat tinggalnya dalam beberapa waktu yang singkat.
- b. Uang yang dibelanjakan selama tidak berada ditempat tinggalnya adalah uang yang dibawa dari tempat tinggalnya dan bukan uang yang

diperoleh ditempat tujuan yang dikunjunginya (Olgivie dalam Marpaung,2002:20).

Pariwisata adalah perjalanan yang di lakukan dari suatu tempat objek wisata ke objek wisata lainnya, dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “tourist”.

Menurut Oxford English Divtionary defenisi turis adalah orang yang melakukan perjalanan ke luar daerah tempat tinggal nya, dengan tujuan rekreasi melihat beberapa objek wisata,bertujuan mendapat kesenangan dan melihat kebudayaan, sedangkan objek wisata adalah sebuah tempat yang terbentuk dari alam dan budaya masyarakat serta potensi ekonomi yang dapat ditawarkan untuk menarik minat wisata (Marpaung,2002:217)

Sedangkan objek wisata itu sendiri menurut Ngapena (2003:27) adalah keadaan alam,bangunan bersejarah, kebudayaan dan pusat-pusat rekreasi modern yang menarik untuk di kunjungi oleh wisatawan.

Menurut Nyoman S.Pandit, ada 10 dasar unsur pokok industri pariwisata yaitu:

- a. Politik pemerintah terhadap kunjungan wisatawan,sikap pemerintah ini dapat berpengaruh langsung terhadap kunjungan wisatawan maupun tidak langsung berpengaruh, seperti situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik, ekonomi serta keamanan dalam Negara itu sendiri
- b. Perasaan ingin tahu, manusia pada hakikatnya serba ingin mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya, baik didalam maupun diluar lingkungannya, ia ingin tahu tentang kebudayaan, cara hidup, adat-istiadat, cuaca, dan hawa

yang berbeda, keindahan dan keajaiban alam yang tidak dalam lingkungannya sendiri

- c. Sifat ramah tamah, hasil penelitian dan peninjauan PATA (pacific area travel association) yang berkantor pusat di San Francisco California menyatakan bahwa rakyat Indonesia memiliki kebudayaan yang kental dan anggun merupakan bangsa yang sangat ramah
- d. Jarak dan waktu, kelancaran, kecepatan, dan ketepatan transportasi bisa mendekatkan jarak yang harus ditempuh dan waktu yang digunakan wisatawan relative lebih singkat
- e. Atraksi, sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menarik wisatawan dan juga memiliki nilai.
- f. Akomodasi, fasilitas yang disediakan oleh pihak terkait seperti rumah sementara bagi wisatawan yang mengharapkan kenyamanan, keanehan, pelayanan yang baik, kebersihan yang menjamin, kesehatan serta hal-hal kebutuhan hidup sehari-hari yang layak dalam pergaulan internasional
- g. Pengangkutan, lalu lintas yang lancar, kondisi jalan yang baik, alat-alat angkut yang nyaman, yang terpenting adalah ketepatan jadwal perjalanan serta keteraturan jadwal
- h. Harga-harga, wisatawan luar negeri maupun domestik pada umumnya bukanlah orang yang kaya raya, karena itu mereka ingin segala sesuatunya berharga murah, menurut penelitian Patterson, Ratio wisatawan laki-laki dan perempuan adalah 3:4, ini berarti wisatawan wanita lebih banyak dibandingkan wisatawan laki-laki dan pada umumnya wisatawan wanita ingin semua barang yang lebih baik dan berharga lebih murah
- i. Publisitas dan promosi, kampanye atau propaganda kepariwisataan yang didasarkan atas program yang teratur dan berkelanjutan baik masyarakat domestik untuk mendapatkan dukungan maupun masyarakat internasional
- j. Kesempatan belanja, kesempatan untuk membeli barang yang menjadi ciri khas dari suatu daerah sebagai oleh-oleh terhadap turis yang berkunjung untuk dibawa pulang kerumah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Harry G Clement, uang yang digunakan oleh seorang wisatawan untuk

membeli oleh-oleh rata-rata berkisar 25%-26,3% dari jumlah ongkos-ongkos pembayaran akomodasi, transportasi local dan makan minum.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan,pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah,dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala besar

Menurut Danang (2012:236) pengembangan organisasi adalah sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai humanitis demokratis,dengan tujuan meningkatkan efektifitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. nilai-nilai yang mendasar organizational development robibins dan judge,2007 dalam Danang 2012 adalah :

- a. Penghormatan terhadap manusia
- b. Kepercayaan dan dukungan
- c. Penyeimbang kekuasaan
- d. Konfrontasi
- e. Partisipasi

Dengan adanya organisasi yang berupa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan objek wisata, sehingga dapat menarik minat wisatawan yang berada didalam daerah maupun wisatawan yang berasal dari luar daerah.dalam usaha untuk mengembangkan

objek wisata perlu didukung oleh berbagai macam strategi yang perlu dilakukan antara lain :

a. Sarana dan prasarana

Gamal Suwanto (2007:22) mengatakan bahwa sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya

Sarana kepariwisataan menurut Oka A.Yoeti (1996:10) dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) Sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstruktur) adalah perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada lalu lintas wisatawan dan travels lainnya, fungsinya untuk menyediakan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kepentingan wisatawan, yang termasuk dalam sarana pokok kepariwisataan adalah agen perjalanan, transportasi pariwisata, tempat penginapan dan sebagainya
- 2) Sarana pelengkap kepariwisataan (supplementing tourism superstruktur) adalah fasilitas yang ada di objek wisata memiliki fungsi untuk melengkapi sarana pokok dan juga membuat wisatawan terasa nyaman sehingga bisa lebih lama tinggal di objek wisata tersebut. yang termasuk dalam sarana pelengkap ini adalah tempat olahraga seperti lapangan golf, kolam renang, tempat fitness, dan lain-lain

3) Sarana penunjang kepariwisataan (supplementing tourism struktur), adalah sarana-sarana yang dibutuhkan wisatawan di luar sarana pokok dan pelengkap saja, fungsinya yang lebih penting agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya, yang termasuk dalam sarana penunjang ini antara lain, club malam, kasino, toko cendramata, bioskop dan lain-lain

Dengan adanya sarana kepariwisataan, diharapkan objek pariwisata yang ada di daerah dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya dan tinggal dalam jangka waktu tertentu. Serta dapat menikmati pelayanan yang memuaskan dari pihak pengelola pariwisata.

Antara sarana dan prasarana kepariwisataan, tentu saja saling menunjang dan saling terkait guna peningkatan mutu objek wisata dan kualitas pelayanan kepariwisataan dalam melayani wisatawan yang datang, sehingga wisatawan dapat merasakan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan.

a. Produk yang ditawarkan

Menurut Yoeti (1996:15) mengatakan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan wisatawan khususnya traveler selama di perjalanan.

Meldin dan Meddleton dalam Oka A. Yoeti (1996:164) mengatakan bahwa produk industri pariwisata adalah semua jasa-jasa yang dibutuhkan wisatawan semenjak ia berangkat dari tempat tinggalnya sampai di daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya sampai ia kembali ke rumah tempat tinggalnya.

Dengan adanya produk pariwisata yang ditawarkan didaerah objek pariwisata maka diharapkan semua wisatawan dapat merasakan kepuasan dan tidak merasakan kekecewaan dalam perjalanan wisatanya.

b. Promosi/memperkenalkan objek wisata

Menurut Oka A.Yoeti (1996:186) pada dasarnya promosi bertujuan untuk memberikan informasi kepada wisatawan melalui komunikasi agar mereka terpikirkan untuk melakukan sesuatu.

Happy Marpaung (2002:103) mengatakan bahwa promosi ialah suatu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permintaan produk pariwisata dari wisatawan sehingga produk tersebut menjadi lebih baik dan menarik.

Menurut Oka A.Yoeti (1996:188) alat promosi ada 3 macam yaitu :

- 1) Advertising, acara yang tepat untuk memberitahukan hasil produk kepada calon konsumen yang masih belum kenal keuntungannya dapat menjangkau banyak orang melalui media masa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan bioskop
- 2) Sales support, bantuan pada penjual dengan memberikan semua materi promosi yang direncanakan untuk diberikan kepada umum, seperti brosur, poster dinding, guide book, folder dan sebagainya
- 3) Public relation, mempunyai tugas memelihara hubungan dunia luar perusahaan, memberikan informasi yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas informasi yang diberikan dan perusahaan

dapat menunjukkan hubungan sosial yang baik dilingkungan masyarakat, bentuk public relation yaitu membagi-bagi berita, konferensi, menjernihkan dan menyelesaikan persoalan yang ada.

c. Kemampuan sumber daya alam

Nuwani (2003:40) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang nyata, secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang baik dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksanaannya. demikian juga dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang hanya dapat berjalan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksanaannya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya.

Pentingnya peranan manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan.oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya akan melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi pelaksana pariwisata.

d. Penataan ruang

Penataan dalam hal ini diharapkan dapat mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan objek wisata. Dengan adanya penataan yang bagus terhadap objek wisata, maka keindahannya dapat tercipta dan dapat dinikmati oleh wisatawan. Kebanyakan objek wisata yang kurang dinikmati oleh wisatawan, dikarenakan oleh pengelola objek wisata yang bersangkutan tidak memperhatikan penataan tata ruangnya. Oleh karena itu, penataan ruang objek wisata patut untuk diperhatikan dengan maksimal, agar tidak menjenuhkan, akan tetapi memiliki suasana yang menyegarkan, menarik dan dapat mengurangi beban yang ada serta dapat melahirkan inspirasi yang baru dan baik bagi setiap wisatawan yang datang, menurut UU No 10 Tahun 2009 penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local
- b. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas
- c. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
- d. Memberdayakan masyarakat setempat
- e. Menjamin keterpaduan antar sector, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan
- f. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.

10. Pengembangan pariwisata

Pengembangan tidak terlepas dari suatu upaya usaha mengembangkan dari objek wisata yang sudah di bangun sebelumnya. Keberhasilan pengembangan ditentukan oleh tiga faktor sebagaimana dikemukakan oleh Yoeti (1996:3003):

Ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan yaitu :

1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata
2. Adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata
3. Terjadinya fasilitas adminitie yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi pengembangan pariwisata yang dimaksud adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk memperbaiki mutu pelayanan, sarana dan prasarana secara fisik maupun non fisik pariwisata untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Dalam hal ini,Yoeti (1996:1970) mengemukakan bahwa sarana pariwisata adalah perusahaan yang memberikan sebuah pelayanan terhadap wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung hidup nya yang tergantung pada kedatangan wisatawan.

Menurut Pitana (2009:134) mengatakan pengembangan destinasi pariwisata merupakan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sector lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas local, dan seterusnya.

Oka A.Yoeti didalam bukunya pengantar ilmu pariwisata, mengemukakan, berhasilnya pengembangan industri pariwisata ditentukan oleh:

- a. Tersedianya objek dan atraksi wisata yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah wisata
- b. Adanya fasilitas accesbility yaitu sarana dan prasarana dengan segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan para wisatawan dan mengunjungi suatu daerah wisata tersebut
- c. Tersedianya fasilitas aminutes yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan selama perjalanan wisata dilakukan

Pengembangan suatu objek wisata memerlukan suatu perencanaan pengembangan yang mantap. Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan (Kadarman et al,2001:54)

Sedangkan menurut Kunarjo (1996:7) perencanaan adalah penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang, yang diarahkan pencapaian sasaran. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsur-unsur:

- a. Berhubungan dengan hari depan
- b. Mendisain seperangkat kegiatan secara sistematis
- c. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu

Lebih lanjut ia mengatakan, perencanaan yang baik mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Didasari dengan tujuan pembangunan
- b. Konsisten dengan realitas
- c. Pengawasan yang berkelanjutan
- d. Mencakup aspek fisik dan pembiayaan
- e. Memahami sebagai ciri hubungan antara variable
- f. Mempunyai koordinasi yang baik

Sedangkan dalam proses analisis kebijakan, menurut Cook dan Vaupel dalam Solichin (2012:42) terbagi dalam tahapan-tahapan:

- a. Analisis kebijakan itu sendiri
- b. Penelitian kebijakan
- c. Penelitian ilmu sosial terapan

Adapun tingkatan-tingkatan perencanaan pengembangan ialah biasanya rencana akan dibangun diatas suatu masa tersebut biasanya akan dibagi dalam beberapa tingkatan-tingkatan tertentu seperti:

- a. Pengindentitasan dan inventori dari sistuasi yang ada
- b. Forecast-forecast untuk masa depan
- c. Perumusan-perumusan rencana
- d. Pengembangan rencana menurut jenisnya
- e. Instrumentasi (Happy Marpaung 2002:7)

Dalam buku yang berbeda marpaung mengatakan bahwa perencanaan pengembangan akan membutuhkan panduan yang luas dan pengalaman dalam usulan rencana-rencana. Umumnya tim ini akan terdiri dari kelompok spesialis. Terbagi dalam kategori-kategori yang luas seperti dari service-service teknik, spesialis marketing, orang-orang yang membuat rencana dan ahli-ahli ekonomi. Umumnya yang lebih dominan ialah seperti spesialis ahli-ahli pengembangan yang termasuk:

- a. Ahli-ahli dagang
- b. Orang-orang yang membuat rencana fisik
- c. Ahli-ahli ekonomi
- d. Ahli mesin infrastruktur
- e. Ahli mesin transportasi
- f. Ahli gambar dan designer-designer
- g. Ahli hokum (Happy Marpaung 2002:6)

Pengembangan sector swasta akan mempengaruhi sector-sektor lain, hal ini disebabkan pengembangan sector pariwisata cenderung melibatkan sector-sektor lain, sector pariwisata ini akan mendorong perkembangan sector ekonomi seperti yang diungkapkan Dr. Salah Wahab bahwa perkembangan pariwisata mendorong perkembangan berupa sector ekonomi daerah:

- 
- a. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan pengembangan secara terus menerus dan pembaharuan fasilitas pariwisata. Hal ini meliputi pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pariwisata
 - b. Mengugah industry-industri baru yang berkaitan dengan jasa. Jasa wisata misalnya usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan dan lain-lain), yang memerlukan perluasan beberapa industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan
 - c. Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian
 - d. Memperluas pasar barang-barang local
 - e. Menunjang pendapatan daerah, sehingga memajukan perekonomian masyarakat setempat
 - f. Memberi dampak kepada tenaga kerja di daerah itu, karena pariwisata memperluas lapangan kerja baru
 - g. Membantu pengembangan kawasan atau perdesaan terpencil dalam suatu daerah, jika kawasan itu memiliki daya tarik pariwisata
- (Wahab, 1998:111)

Menurut Josep Riwo Kaho, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Josep Riwo Kaho

2002:123). Pemerintah daerah tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal, efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam diagram sebagai berikut

GAMBAR II.1 : Kerangka Pikiran tentang Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Modifikasi Penulis

C. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam pemakaian konsep yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan sesuai dengan penelitian yang terdapat didalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dan suatu tempat lain dengan maksud bukan alasan berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna berpiknik dengan kegiatan lainnya.
2. Objek wisata adalah segala sesuatu yang berupa yang berasal dari alam dan budaya masyarakat yang dapat menjadi daya tarik orang untuk mengunjungi objek wisata
3. Fasilitas wisata adalah sarana dan prasarana yang terdapat dilokasi tersebut
4. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan, menyediakan jasa pariwisata agar wisatawan dapat menikmati objek dan daya tarik wisata
5. Pengembangan objek wisata adalah proses pengembangan dan penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam menyelenggarakan kepariwisataan,

dengan tujuan meningkatkan rasa puas, baik wisatawan maupun warga yang menjalankan disana

6. Wisata adalah setiap orang yang pergi kewisata dengan tujuan menikmati keindahan alam budaya maupun potensi ekonomi masyarakat setempat
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah suatu badan atau kantor pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan pengembangan objek dan aktivitas pariwisata, melaksanakan sarana dan prasarana wisata
8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program Objek Wisata Danau Sipogas adalah kegiatan yang bertujuan menyediakan, menyelenggarakan jasa pariwisata agar wisatawan dapat menikmati Objek dan daya tarik wisata Danau Sipogas
9. Melakukan kegiatan pameran kepariwisataan tingkat provinsi dan nasional adalah upaya memberikan fasilitas yang terdapat dilokasi wisata Danau Sipogas tersebut
10. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan wisata Danau Sipogas adalah proses pengembangan dan penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam menyelenggarakan wisata Danau Sipogas, dengan tujuan meningkatkan rasa puas baik wisatawan maupun warga yang menjalankan usaha disana

D. Operasional Variabel

Tabel II.I : Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variable	Indicator	Item penilaian	Skala
peranan adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (George R Terry)	Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek wisata Danau Sipogas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Perencanaan	a.adanya petugas yang bekerja sesuai jadwal b.adanya sosialisasi terhadap pengunjung tentang fasilitas yang di awasi c.adanya perawatan terhadap fasilitas utama	-berperan -cukup berperan -kurang berperan
		Pengorganisasian	a.adanya petugas yang mengawasi fasilitas utama b.jelasnya tugas,wewenang, dan tanggung jawab c.adanya sanksi bagi petugas yang tidak disiplin	-berperan -cukup berperan -kurang berperan
		Pelaksanaan	a.petugas bekerja sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawab secara	-berperan -cukup berperan -kurang berperan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

			konsisten b.petugas merasa terlindungi dalam menjalankan tugas,wewenang, dan tanggung jawab c.atasan selalu memberi arahan	
		Pengawasan	a.fasilitas utama selalu di pantau atasan b. fasilitas utama sesuai dengan kegunaannya c. petugas selalu di awasi atasan	-berperan -cukup berperan -kurang berperan

E. Teknik Pengukuran

Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Berperan : Apabila peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu yang terdiri dari 3 sub indicator tersebut berkisar > 67%

Cukup berperan : Apabila peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu yang terdiri dari 2 sub indicator tersebut berkisar 34%-66%

Kurang berperan : Apabila peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu yang terdiri dari 1 sub indicator tersebut berkisar <33%

Pengukuran untuk masing-masing indicator adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program objek wisata danau sipogas

Berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu penyusunan rencana dan pelaksanaan program objek wisata danau sipogas yang terdiri dari 3 sub indicator tersebut berkisar >67%

Cukup berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu penyusunan rencana dan pelaksanaan program objek wisata danau sipogas yang terdiri dari 2 sub indicator tersebut berkisar 34%-66%

Kurang berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu penyusunan rencana dan pelaksanaan

program objek wisata danau sipogas yang terdiri dari 1 sub indicator tersebut berkisar <33%

2. Melakukan kegiatan pameran kepariwisataan tingkat provinsi dan nasional

Berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu melakukan kegiatan pameran kepariwisataan tingkat provinsi dan nasional yang terdiri dari 3 sub indicator tersebut berkisar >67%

Cukup berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu penyusunan rencana dan pelaksanaan program objek wisata danau sipogas yang terdiri dari 2 sub indicator tersebut berkisar 34%-66%

Kurang berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu penyusunan rencana dan pelaksanaan program objek wisata danau sipogas yang terdiri dari 1 sub indicator tersebut berkisar <33%

3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan objek wisata danau sipogas

Berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan wisata danau sipogas yang terdiri dari 3 sub indicator tersebut berkisar >67%

Cukup berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan wisata danau sipogas yang terdiri dari 2 sub indicator tersebut berkisar 34%-66%

Kurang berperan : Apabila dinas pariwisata dan kebudayaan telah mampu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan wisata danau cibogas yang terdiri dari 1 sub indicator tersebut berkisar <33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penggunaan Tipe Penelitian ini untuk mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan pengumpulan fakta-fakta yang ada, penelitian dibatasi dengan data yang terkumpul dari sampel yang mewakili populasi

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe *deskriptif*, menurut Darmadi (2013:6) yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, adapun analisa dalam penelitian ini mengenai permasalahan yang dihadapi Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Objek Wisata Danau Cibogas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rokan Hulu khususnya pada bidang pariwisata selaku yang di berikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan potensi kepariwisataan yang ada di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu mengenai Objek Wisata Danau Cibogas.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. populasi wilayah generalisasi yang terdiri dari

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan keseluruhan populasi yang terdiri dari sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,Kepala Bidang Pariwisata,kepala Seksi Pengembangan Objek Pariwisata,Pegawai Sub Bidang Pariwisata dan Pengunjung Objek Wisata. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.1 Jumlah populasi dan sampel penelitian Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Objek Wisata Danau Cibogas di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Sekretaris dinas pariwisata dan kebudayaan	1	1	100%
2	Sub bagian perencanaan dan evaluasi	1	1	100%
3	Seksi pengembangan objek pariwisata	1	1	100%
4	Seksi sarana dan prasarana	5	5	100%
5	Pengunjung objek wisata	~	30	~
Jumlah		-	38	-

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus yaitu mengambil seluruh populasi menjadi responden yang disebabkan jumlahnya relative sedikit

dan berada dalam suatu tempat yang sama sedangkan untuk pengunjung digunakan teknik incidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah peneliti

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang telah tersedia yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang dianggap perlu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik:

1. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek yakni permasalahan Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang akan diteliti sehingga diperoleh gambaran yang berhubungan dengan penelitian.

2. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden yakni pegawai Dinas Pariwisata kabupaten Rokan Hulu untuk di jawab yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian hasil jawaban responden akan dikelompokkan secara sistematis untuk dianalisa secara menyeluruh

3. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertulis bersifat terbuka. adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan mengenai Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diolah dipersentasikan untuk dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa

kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian alasan.

Table III.2 Jadwal pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2017																			
		April				Mai				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi skripsi																				
10	Ujian Konferensif skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum kabupaten rokan hulu

1. Keadaan geografis

Kabupaten rokan hulu adalah salah satu kabupaten di provinsi riau.

Dijuluki negeri seribu suluk, ibu kota nya berada di pasir pengaraian dengan letak geografis 00 25' 20 derajat LU – 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT, memiliki luas wilayah 7.749.85 km².

Wilayah kabupaten rokan hulu memiliki 3 sungai besar disamping beratus-ratus sungai kecil yang dijadikan masyarakat tempatan sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Sungai rokan kanan, sungai rokan kiri dan batang sosah yang bermuara ke sungai rokan bagian hilir dengan panjang lebih kurang 100 km, kedalaman rata-rata 6 m serta lebar 92 m. daerah rokan hulu merupakan daerah dataran rendah sampai sedang yang terletak dibagian timur deretan bukit barisan dengan ketinggian berkisar 5-1125 dari permukaan air laut. Kabupaten rokan hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 310c – 220c.

Kabupaten rokan hulu dengan ibukota pasir pengaraian dengan batas wilayah :

- Timur berbatas dengan kabupaten Kampar
- Barat berbatas dengan provinsi sumatera utara
- Utara berbatas dengan kabupaten rokan hilir
- Selatan berbatas dengan provinsi sumatera barat

2. Keadaan penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk, penduduk kabupaten rokan hulu berjumlah 390.481 jiwa. Etnis yang berdomisili di kabupaten rokan hulu sebagian besar etnis melayu. Hanya sebagian kecil saja etnis lain, seperti jawa, minangkabau, sunda dan batak. Sedangkan etnis minangkabau, sunda dan batak tidak mendiami kecamatan yang spesifik, namun membaaur dengan penduduk setempat.

Masyarakat kabupaten rokan hulu dalam sosial mereka terdapat banyak kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-sifat mengasih dan saling tolong menolong jika ada salah satu masyarakat dapat musibah atau memerlukan pertolongan lainnya. Mereka juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu atau kelompok mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.

Penyebaran penduduk di kabupaten rokan hulu pada umumnya mengikuti sebagian besar pinggiran jalan dan pemukiman warga.

Rata-rata pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 2008 adalah 3,29% pertahun. berdasar kan hasil sensus penduduk 2009 adalah 4,93% pertahun, maka laju pertumbuhan penduduk disebabkan banyaknya warga pendatang yang masuk ke daerah ini. Karena rokan hulu merupakan tempat yang menarik bagi para pialang kebun untuk menanamkan modal nya di daerah ini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam bab ini disajikan data hasil penelitian yang telah dilakukan berupa distribusi frekuensi hasil kuesiner tentang indikator Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Danau SiPogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta analisa jawaban terhadap pertanyaan penelitian tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Danau SiPogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Objek Wisata Danau SiPogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel V.I Identitas responden tentang peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	20	53%
2	Perempuan	18	47%
Jumlah		38	100%

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden sebanyak 20 orang laki-laki dengan persentase 53% dan perempuan sebanyak 18 orang dengan persentase 47%.

2. Pekerjaan

Untuk informasi mengenai data pekerjaan , penulis menanyakan pertanyaan ini kepada masyarakat yang berwisata di danau sipogas tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel V.II Identitas responden tentang peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	jumlah	Persentase
1	Pegawai dinas	8	21%
2	Mahasiswa	20	53%
3	Wiraswasta	7	18%
4	Pedagang	3	8%
Jumlah		38	100%

Berdasarkan table diatas dapat di ketahui bahwa pekerjaan responden 8 orang sebagai pegawai dinas dengan persentase 21%, mahasiswa 20 orang dengan persentase 53%, wiraswasta 7 orang dengan persentase 18%, sedangkan pedagang 3 orang dengan persentase 8%.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh responden. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel V.III Identitas responden tentang peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu berdasarkan tingkat pendidikan

No	pendidikan	jumlah	Persentase
1	Sma	17	45%
2	D3	3	8%
3	S1	16	42%
4	S2	2	5%
Jumlah		38	100%

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden 17 orang dengan persentase 45% SMA, 3 orang dengan persentase 8% D3, 16 orang dengan persentase 42% S1, dan 2 orang dengan persentase 5% S2.

B. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian tentang peranan dinas pariwisata dan kebudayaang terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu dapat dilihat dari indicator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Menurut (Terry, 2014:17) perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digarikan,planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan,karena termasuk alternatif-alternatif keputusan.

Untuk melihat hasil kuisioner tentang indicator perencanaan dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.IV Distribusi tanggapan responden terhadap indicator perencanaan

No.	Item Penilaian	Skala Ukuran			Persentase (%)
		Baik	Cukup	Kurang	
1.	Apakah petugas sudah bekerja sesuai jadwal?	12 (40%)	2 (7%)	16 (53%)	30 (100%)
2.	Apakah fasilitas utama sudah di awasi?	11 (37%)	15 (50%)	4 (13%)	30 (100%)
3.	Apakah sudah ada perawatan yang dilakukan terhadap fasilitas utama?	8 (26%)	11 (37%)	11 (37%)	30 (100%)
	Jumlah	31	28	31	90
	Rata-rata	11	8	11	30
	Persentase	37%	26%	37%	100%

Dari table di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden untuk menjawab indicator perencanaan yang terdiri dari 3 sub indicator yaitu petugas bekerja sesuai jadwal,fasilitas utama yang diawasi,dan perawatan terhadap fasilitas utama yaitu,rata-rata 11 dari 30 orang jumlah responden dengan persentase 37% berada pada ketegori baik, adapun alasan responden yang berasal dari pengunjung objek wisata danau sipogas adalah selama ini menyusun rencana agar musholla di danau sipogas tersebut lebih layak untuk

digunakan. Rata-rata 8 dari 30 orang jumlah responden dengan persentase 26% berada pada kategori cukup baik, adapun alasan responden yang berasal dari pengunjung objek wisata danau sipogas adalah kurang bersih nya taman bermain untuk anak-anak yang ada di danau sipogas tersebut, Rata-rata 11 dari 30 jumlah responden dengan persentase 37% berada pada kategori kurang baik, adapun alasan responden yang berasal dari pengunjung objek wisata danau sipogas adalah karena tidak jelasnya lokasi parkir yang ada di danau sipogas tersebut.

Berdasarkan hasil analisis table di atas penulis dapat menyimpulkan untuk indikator perencanaan terletak pada kategori cukup baik, dengan persentase 63%.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sub bagian perencanaan dan evaluasi pariwisata yaitu perencanaan pengembangan objek wisata danau sibogas di kecamatan Rambah Kabupaten okan hulu sudah berjalan cukup baik, bahwasanya petugas sudah menjalankan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan, dan adanya fasilitas-fasilitas yang di awasi dalam tujuan pengembangan objek wisata danau sibogas.

“Iya benar, saya selaku kepala sub bagian perencanaan dan evalusasi sudah melakukan perencanaan tentang disiplin nya pegawai dengan memberikan jadwal kepada para pegawai dinas untuk melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”

Sementara berdasarkan observasi peneliti bahwa petugas dinas pariwisata dan kebudayaan memang sudah melakukan adanya kegiatan untuk merawat fasilitas yang ada di danau sibogas tersebut, namun dalam hal pengawasan yang dilakukan dinas pariwisata dan kebudayaan tidak sepenuhnya berjalannya dengan rutin.

2. Pengorganisasian

(Terry, 2014:17) pengorganisasian mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencarian dan penugasan nya ke dalam-dalam unit organisasi di masukkan sebagai unsur organisasi, begitupun juga dengan pengembangan objek wisata, pengorganisasian terhadap sumber daya tersebut sangat berpengaruh kepada pencapaian tujuan wisata.

Untuk melihat hasil kuisioner tentang indikator pengorganisasian dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.V Distribusi tanggapan responden terhadap indicator pengorganisasian

No.	Item Penilaian	Skala Ukuran			Persentase (%)
		Baik	Cukup	Kurang	
4.	Apakah sudah ada petugas yang mengawasi fasilitas utama dalam mengunjungi danau sibogas?	12 (40%)	7 (23%)	11 (37%)	30 (100%)
5.	Apakah tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan sudah jelas?	8 (26%)	13 (43%)	9 (31%)	30 (100%)
6.	Apakah sudah ada sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang tidak disiplin?	10 (40%)	14 (40%)	6 (20%)	30 (100%)
	Jumlah	30	34	26	90
	Rata-rata	10	11	9	30
	Persentase	33%	37%	30%	(100%)

Dari table di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden untuk menjawab indicator pengorganisasian yang terdiri dari 3 sub indicator yaitu petugas yang mengawasi fasilitas utama, tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah jelas, sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang tidak disiplin, rata-rata 10 dari 30 orang jumlah responden dengan persentase 33% berada pada kategori baik, adapun alasan responden yaitu sudah adanya petugas yang mengawasi fasilitas utama di danau sipogas tersebut, rata-rata 11 dari 30

orang jumlah responden dengan persentase 37% berada pada kategori cukup baik, adapun alasan responden dari pengunjung objek wisata danau sipogas tersebut adalah kurang jelasnya tanggung jawab petugas parkir yang menjaga kendaraan di setiap lokasi danau sipogas tersebut, rata-rata 9 dari 30 jumlah responden dengan persentase 30% berada pada kategori kurang baik. Alasan responden yaitu tidak jelasnya sanksi yang diberikan kepada pegawai yang kurang disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi sarana dan prasarana objek wisata yaitu bahwa sudah adanya pengawasan dari pihak dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengawasi sarana dan prasarana, pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah di berikan dengan jelas, dan sudah adanya sanksi yang di berikan.

“iya, saya selaku kepala seksi sarana dan prasarana sudah memberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam bentuk tugas pokok dan fungsi kepada anggota seksi dan memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa belum jelasnya tugas dan fungsi yang diberikan oleh kepala seksi kepada anggota. belum adanya melihat pegawai yang di kenai sanksi Karena tugas pokok dan fungsi masih belum jelas.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat di definisikan sebagai cakupan kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang di tetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat dicapai. Pelaksanaan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawai nya,memberi penghargaan,memimpin,mengembangkan dan memberi kompensasi (G.R Terry,2014:7). Pelaksanaan dalam suatu organisasi mempunyai arti yang sangat penting,sebab di antara fungsi manajemen lainnya pelaksanaan adalah fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia.

Untuk melihat hasil kuisioner tentang indicator pelaksanaan dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.VI Distribusi tanggapan responden terhadap indicator pelaksanaan

No.	Item Penilaian	Skala Ukuran			Persentase (%)
		Baik	Cukup	Kurang	
7.	Apakah petugas sudah bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab?	7 (23%)	13 (43%)	10 (34%)	30 (100%)
8.	Apakah petugas merasa terlindungi oleh aturan dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab?	8 (26%)	14 (48%)	8 (26%)	30 (100%)
9.	Apakah petugas diberi arahan oleh atasan?	9 (30%)	10 (33%)	11 (37%)	30 (100%)

	Jumlah	24	37	29	90
	Rata-rata	8	14	10	30
	Persentase	26%	40%	34%	100%

Dari table di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator pelaksanaan yang terdiri dari 3 sub indikator yaitu petugas bekerja sesuai tanggung jawab, petugas merasa terlindungi, petugas di beri arahan ,rata-rata 8 dari 30 orang jumlah responden dengan persentase 26% berada pada ketegori baik, alasan responden yaitu sudah adanya petugas yang menjalankan tugas yang di berikan oleh atasan, rata-rata 14 dari 30 orang jumlah responden dengan persentase 40% berada pada kategori cukup baik, alasan responden yaitu masih ada petugas yang belum melaksanakan tugas dengan maksimal, rata-rata 10 dari 30 jumlah responden dengan persentase 34% berada pada kategori kurang baik, alasan responden yaitu tidak terlihat adanya arahan yang di berikan atasan kepada petugas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala seksi pengembangan yaitu sudah di berikan nya pengarahan kepada bawahan tentang tanggung jawab terhadap tugas,wewenang dan tanggung jawab yang telah di berikan.

“benar.bahwa petugas dinas pariwisata dan kebudayaan sudah menjalankan tugas,wewenang dan tanggung jawab,petugas sudah terlindungi dalam menjalankan tugas yang sudah diarahkan oleh atasan”.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa tanggung jawab sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas,wewenang dan tanggung jawab, petugas

sudah sudah merasa terlindungi dengan adanya aturan dalam menjalankan tugas namun aturan dalam wewenang tersebut masih belum terarah dengan baik,karena belum cukup nya pemberian arahan oleh atasan.

4. Pengawasan

Pengawasan mencakup kelanjutan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana (Terry 2014:7)

Untuk melihat hasil kuisioner tentang indicator pengawasan dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.VII Distribusi tanggapan responden terhadap indicator pengawasan

no	Item penilaian	Skala ukuran			Persentase (%)
		Baik	Cukup	Kurang	
10	Apakah fasilitas utama selalu dipantau oleh atasan?	10 (34%)	7 23(%)	13 (43%)	30 (100%)
11	Apakah fasilitas utama sudah berfungsi sesuai dengan kegunaannya?	12 (40%)	10 (34%)	8 (26%)	30 (100%)
12	Apakah petugas selalu diawasi oleh atasan dalam menjalankan tugas,wewenang dan tanggung jawab?	9 (30%)	13 (44%)	8 (26%)	30 (100%)
Jumlah		31	30	29	90
Rata-rata		11	10	9	30
Persentas		37%	33%	30%	100%

Dari table di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator pelaksanaan yang terdiri dari 3 sub indikator yaitu fasilitas utama di pantau atasan, fasilitas utama berfungsi sesuai kegunaan, petugas selalu diawasi atasan, rata-rata 11 dari 30 orang jumlah responden dengan persentase 37% berada pada kategori baik, alasan responden yaitu adanya atasan yang memantau fasilitas utama, rata-rata 10 dari 30 orang jumlah responden dengan persentase 33% berada pada kategori cukup baik, alasan responden yaitu sudah mulai berjalan nya fasilitas utama dengan semestinya, rata-rata 9 dari 30 jumlah responden dengan persentase 30% berada pada kategori kurang baik, alasan responden yaitu tidak jelas nya waktu kunjungan atasan ke danau sipogas tersebut untuk mengawasi petugas dan fasilitas-fasilitas yang ada di danau sipogas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris dinas pariwisata dan kebudayaan yaitu sudah berperannya sekretaris dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mengawasi petugas dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi fasilitas yang ada.

“iya, saya selaku sekretaris dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten rokan hulu bahwa memang benar bahwa sudah adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan terkait fasilitas utama yang ada di danau sipogas tersebut”.

Hasil observasi penulis memang sudah adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, namun masih belum maksimal, dan fasilitas utama

sudah berfungsi sesuai dengan kegunaan nya.

Selanjutnya untuk menilai hasil keseluruhan dari Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel V.VIII Rekapitulasi jawaban responden

Rekapitulasi	Baik	Cukup	Kurang	Jumlah
Perencanaan	11 (37%)	8 (26%)	11 (37%)	30 (100%)
Pengorganisasian	10 (33%)	11 (37%)	9 (30%)	30 (100%)
Pelaksanaan	8 (26%)	14 (40%)	10 (34%)	30 (100%)
Pengawasan	11 (37%)	10 (33%)	9 (30%)	30 (100%)
Jumlah	40	44	39	122
Rata-rata	10	12	8	30
Persentase	34%	40%	26%	100%

Dari hasil rekapitulasi responden di atas yang membahas peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Danau Sibogas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori cukup baik karena 30 jumlah responden yang rata-rata 12 orang atau 40% berada pada kategori cukup baik, sedangkan rata-rata 10 orang atau 34% berada pada kategori baik, dan rata-rata 8 orang atau 26% berada pada kategori kurang baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari responden yang sudah di paparkan, bahwa peranan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu dinilai sudah cukup baik oleh masyarakat.

Hambatan dalam pengembangan objek wisata

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu yaitu :

a. Perencanaan

Kurang nya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten rokan hulu terhadap seluruh golongan masyarakat yang berada di sekitar objek wisata danau sipogas, sehingga tujuan dinas tidak terlaksana dengan baik oleh masyarakat.

b. Pengorganisasian

Kurang nya perhatian pihak dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten rokan hulu untuk melengkapi fasilitas yang belum ada pada danau sipogas dan juga tidak ada perhatian oleh pihak dinas yang terkait dalam perawatan fasilitas yang sudah ada.

c. Pelaksanaan

Kurang nya tenaga ahli yang di punya oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten rokan hulu dalam mengembangkan objek wisata

danau sipogas dan juga banyak pegawai yang ada tidak sesuai dengan keahlian nya.

d. Pengawasan

Dalam upaya pengawasan untuk mengetahui bahwa gerakan dari organisasi itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang telah direncanakan, pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin oleh pimpinan, tetapi juga harus ada dukungan dari seluruh petugas agar dalam pelaksanaan pemeliharaan serta perawatan fasilitas utama dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan kegunaan agar masyarakat menjadi nyaman.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu :

1. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipogas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Menurut pelaksana pengembangan pariwisata (sekretaris, bagian perencanaan, seksi pengembangan, seksi sarana dan prasarana) berada pada kategori baik, sementara menurut masyarakat pada kategori cukup baik. Dan setelah penulis lihat dari hasil rekapitulasi penelitian di dukung juga dengan data-data lain seperti dokumen, observasi, wawancara, dan kuisioner maka pengembangan objek wisata danau sipogas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu berada pada kategori cukup baik, Karena dinas pariwisata dan kebudayaan sudah melakukan pengembangan pariwisata, hanya saja belum terlaksananya pengembangan secara keseluruhan di danau sipogas.
2. Hambatan dalam pengembangan objek wisata danau sipogas ini yaitu bahwa para petugas kurang disiplin dalam menjalankan tugas-tugas pengembangan objek wisata seperti petugas kebersihan.

B. Saran

Pemerintah dinas pariwisata dan kebudayaan disarankan memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan dalam pengembangan objek wisata ke arah yang lebih baik dengan memfasilitasi alat-alat yang sesuai dan cocok dengan objek wisata danau sipogas tersebut.

Pemerintah terkait harus selalu melakukan evaluasi terhadap jalan nya pengembangan kegiatan objek wisata danau sipogas oleh para peugas lapangan kepada danau dan lingkungan sekitar nya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,solichin,2012 Analisis Kebijakan Publik,Bumi Aksara,Jakarta
- A.M. Kadarman et al,Illmu Pemerintahan,PT Prenhallindo,Jakarta,2001
- Awang,Azam & Wijaya Mendra,2012.Ekologi Pemerintahan,Pekanbaru,Alaf Riau
- Hamdi, Muklis 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- J.spillane,James,2001,Pariwisata Indonesia,Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan Kasinus,Yogyakarta
- Kansil,CST dan Christine,2003,Sistem Pemerintahan Indonesia,Bumi Aksara,Jakarta
- Kunarjo,1996, Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia,PT. Toko Gunung Agung,Jakarta
- Marpaung,Happy et al,Pengantar Pariwisata,Alfabeta,Bandung,2002
- Munaf,Yusri,2016,Hukum Administrasi Negara,Marpoyan Tujuh,Pekanbaru
- Moekijat,2005Pengembangan Organisasi. Cetakan Ketujuh,Bandung,Mandar Maju
- Moenir,H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.Bumi Aksara. Jakarta
- Ndraha Taliziduhu,2003,Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan baru),Jakarta, PT Rineka Cipta
- Ngapena,Chafid,Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam,Liberty, Yogyakarta
- Nuwani,Hadari,2003,Metode Penelitian Bidang Sosial,Gajah Mada University Press,Yogyakarta
- Nyoman. S. Pandit,Ilmu Pariwisata, PT. Pradya Paramita,PT. Angkasa Bandung, 2004
- Pitana, I Gede dan Ketut,Surya Diarta,2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta,Andi
- Siagian, Sondang P.2007,Fungsi-fungsi Manajerial.Jakarta
- Soekanto,Soerjono,2007,Sosiologi Suatu Pengantar,Raja Grafindo
- Sunyoto,Danang 2012,Manajemen Sumber Daya Manusia,Yogyakarta,CAPS
- Suwantoro,Gamal. 2007.Dasar-Dasar Pariwisata.Yogyakarta,Andi
- Syafiie,Inu Kencana,2005,Pengantar Ilmu Pemerintahan,Bandung,Rafika Aditama

Syafiie Inu Kencana,2007,Ilmu Pemerintahan,Bandung,Mandar Maju

Syafiie Inu Kencana 2008,Manajemen Pemerintahan,Jakarta,PT Perca

Syafiie Inu Kencana,2011,Etika Pemerintahan,Rineka Cipta,Jakarta

Thoha,Miftah,2011.Birokrasi dan Politik di Indonesia.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta

Wahab,Salah,1998,Pemasaran Pariwisata,Pradya Paramita,Bandung

Wasistiono Sadu,2013,Ekologi Pemerintahan,Sumedang,(IPDN) Press Jatinangor

Winardi,J. 2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian.Grafindo Persada. Jakarta

Yoeti,Oka. A,1996 Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung,Angkasa.

Dokumentasi :

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Kepariwisataaan

